KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK			H.1					H.4 X Final	
			H.2	H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan				H.5 Tidak Final	
A. IDE	NTITAS PE	NERIMA PENGHASILA	N YAN	G DIPOTONG					
A.1 NPWP : 7 9 8 9 3 2 3 7 2 7 2 2 0 0 0									
A.2 NIK :									
A.3 Nama : SITI ARTHA MULIANOR, AMD.KEP.									
B. PP	h PASAL 21	YANG DIPOTONG							
MASA PAJAK (mm-yyyy)		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)		DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
	B.1	B.2		B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
	4	21-402-01		8.490.000	8.490.000	0	5	424.500	
					bebankan kepada APBN atau	APBD yang Dite	rima oleh PN	S, Anggota	
B.8									
	Nama Dokumen Biaya Pembayaran Tanggal 0 4 dd 0 4 mm 2 0 2 2 yyyy								
B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.									
Nomor: Tanggaldd									
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :									
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :									
C. IDE	NTITAS PE	MOTONG PAJAK							
C.1 NPWP Instansi Pemerintah : 9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0									
C.2	Nama Instan	si Pemerintah :	RUM	AH SAKIT JIWA DAE	RAH ATMA HUSADA MAHAK	AM PROVINSI K	ALIMANTAN	ITIMUR	
C.3	C.3 ID Subunit Organisasi :								
C.4	Tanggal	:	0 4 dd 0 4 mm 2 0 2 2 yyyy						
C.5	Nama Penan	datangan :	RIANDY						
C.6	Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.								
				i dengan ketentuan yang onik sehingga tidak diperl	berlaku, Direktorat Jenderal Pajak ukan tanda tangan.	: mengatur bahwa (dokumen ini tela	ah ditandatangani secara	

8PATL4B7